

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (P-APBD)
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

HARI RABU, 2 SEPTEMBER 2026



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Gedung DPRD Kabupaten Kebumen Jl. Merdeka Nomor 6 Kebumen



Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh.

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, Ketua DPRD, Para Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan seluruh jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Ysh. Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua BUMD di Kabupaten Kebumen, dan Camat se-Kabupaten Kebumen;

Ysh. Hadirin tamu undangan, rekan-rekan wartawan, pemirsa Kebumen TV serta pendengar setia Radio IN-FM Kebumen dimanapun berada.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebelum mengawali penyampaian Pandangan Umum **Fraksi Partai Gerindra** terhadap Raperda

Kabupaten Kebumen tentang P-APBD Tahun Anggaran 2026, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Rabu, 2 September 2026 kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal'afiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam yang kita nantikan syafa'atnya di *Yaumul Qiyamah*. *Amin Ya Rabbal A'lamin*.

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan Hadirin yang berbahagia.

Atas nama Fraksi Partai Gerindra kami mengucapkan terimakasih kepada :

- 1) Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menggunakan

mimbar terhormat ini, guna menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

- 2) Bupati, Wakil Bupati dan jajaran eksekutif terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen atas penyampaian dan penjelasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
- 3) Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen yang telah mencermati dan mengkaji Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari proses pembahasan bersama.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Setelah kami membaca, mencermati, dan mempelajari dokumen Raperda tentang P-APBD Tahun Anggaran 2026, maka Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kebumen memandang perlu untuk memberikan sedikit catatan, pertanyaan dan pernyataan dalam pandangan umum sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Fraksi Partai Gerindra memahami bahwa perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan kondisi fiskal dan kebutuhan pelaksanaan program pembangunan tahun berjalan. Kami mencermati bahwa belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 meningkat dari sekitar Rp2,99 triliun menjadi Rp3,13 triliun, atau bertambah sekitar Rp134,35 miliar. Sementara itu,

pendapatan daerah justru sedikit menurun menjadi sekitar Rp2,91 triliun. Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran meningkat menjadi sekitar Rp221,11 miliar. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan apakah tambahan belanja tersebut telah diarahkan secara optimal pada program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, serta didukung target dan indikator kinerja yang jelas. Mohon tanggapan.

2. Fraksi Partai Gerindra mencermati bahwa defisit Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp221,11 miliar ditutup melalui SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp221,11 miliar. Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan mengenai rincian pemanfaatan SiLPA tersebut dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, termasuk program dan kegiatan prioritas yang dibiayai dari SiLPA serta besaran alokasi anggarannya. Kami berpandangan bahwa informasi tersebut penting untuk mengetahui

sejauh mana pemanfaatan SiLPA diarahkan untuk mendukung program prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mohon tanggapan.

3. Fraksi Partai Gerindra mencermati bahwa PAD secara keseluruhan relatif tetap, yaitu sekitar Rp583,54 miliar menjadi Rp583,46 miliar. Namun terdapat perubahan yang cukup signifikan pada komponennya, yaitu pajak daerah turun sekitar Rp7,42 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga turun sekitar Rp7,52 miliar, sementara retribusi daerah meningkat sekitar Rp15,78 miliar. Perubahan komposisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah. Kami meminta penjelasan mengenai penyebab turunnya target pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta strategi konkret dalam mengoptimalkan potensi PAD yang masih dapat digali. Mohon tanggapan.

4. Fraksi Partai Gerindra mencermati adanya pengurangan belanja hibah sekitar Rp21,29 miliar, bantuan sosial sekitar Rp3,86 miliar, serta bantuan keuangan sekitar Rp23,88 miliar. Kami memahami bahwa penyesuaian anggaran dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi kemampuan keuangan daerah. Namun, pengurangan tersebut harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan evaluasi yang objektif, sehingga tidak mengurangi hak dan manfaat masyarakat yang membutuhkan. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan mengenai dasar evaluasi dan prioritas pengurangan anggaran tersebut, termasuk dampaknya terhadap pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan di desa. Mohon tanggapan.
5. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi peningkatan belanja modal sekitar Rp65,72 miliar menjadi Rp359,23 miliar, termasuk belanja jalan, jaringan, dan

irigasi yang meningkat sekitar Rp25,88 miliar menjadi Rp202,73 miliar. Kami meminta penjelasan mengenai prioritas penggunaan tambahan anggaran tersebut serta target penyelesaian pekerjaan, dengan memastikan pelaksanaannya tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Mohon tanggapan.

6. Fraksi Partai Gerindra mencermati bahwa anggaran urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meningkat sekitar Rp122,45 miliar, dari sekitar Rp1,88 triliun menjadi Rp2,00 triliun. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi peningkatan tersebut karena pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar merupakan kebutuhan fundamental masyarakat. Kami meminta agar setiap tambahan anggaran memiliki target kinerja yang jelas, indikator hasil yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ke tahap berikutnya, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi Partai Gerindra menyarankan agar seluruh proses pembahasan dilakukan dengan ketelitian, kehati-hatian, keterbukaan, serta didukung data yang lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

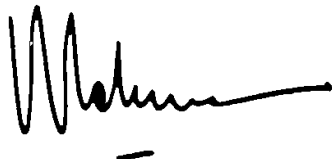
Demikian Pandangan Umum **Fraksi Partai Gerindra** terhadap raperda tentang **Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026**. Kami harap semua masukan, saran dan perbaikan yang termuat dalam pandangan umum fraksi menjadi catatan untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan dan penyempurnaan Raperda.

Apabila dalam penyampaian Pandangan Umum banyak hal-hal yang kurang berkenan, dengan segala kerendahan hati atas nama **Fraksi Partai Gerindra** kami memohon maaf yang setulus-tulusnya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua



Maksud Sodik

Sekretaris



Bambang Suparjo